

PEMIMPIN BARU DAN TANTANGAN PENINGKATAN KUALITAS KEBIJAKAN PUBLIK

Pada tahun 2018 ini ada sebanyak 171 Daerah yang mengadakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Ada 17 provinsi; 115 kabupaten dan 39 kota yang menyelenggarakan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin daerahnya. Para pemimpin baru inilah yang akan mengendalikan roda pemerintahan daerah selama lima tahun kedepan dan menghasilkan beragam kebijakan di berbagai sektor dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan publik merupakan pilihan tindakan yang akan dilakukan pemerintah dalam merespon dan menyelesaikan berbagai persoalan publik. Dewasa ini, pemerintah dituntut untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas. Pemerintah dituntut mampu menghasilkan kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah publik dan berjalan secara efektif dan/atau efisien. Nugroho (2017) menyebutkan ada sepuluh prinsip kebijakan publik unggul dan berkualitas, yaitu pertama, kebijakan publik adalah kebijakan untuk publik sehingga sejak awal meletakkan unsur kepentingan publik di atas kepentingan lainnya. *Kedua*, kolaborasi kognitif, di mana pembuat kebijakan menggunakan konsep, teori, dan metode pembuatan kebijakan publik, termasuk analisis kebijakannya, secara baik dan dijadikan sebagai perhatian utama dalam proses pembuatan kebijakan. *Ketiga*, kolaborasi nilai, di mana pembuat kebijakan mampu masuk ke ranah empati kepada publik yang menjadi target kebijakan. *Keempat*, titik tiada kembali (*a point of no return*), kebijakan publik adalah keputusan pemerintah yang tidak dapat ditarik kembali sehingga harus dibuat dengan serius dan sungguh-sungguh. *Kelima*, kebijakan tidak cukup bukan sekadar baik tetapi unggul. Kebijakan yang baik sering menjadi penghambat kebijakan yang unggul. *Keenam*, kebijakan publik adalah lebih sebagai proses manajemen daripada proses politik. Proses politik hanya diperlukan pada saat pembuatan keputusan. *Ketujuh*, kebijakan publik adalah masalah moral, bukan teknis. *Kedelapan*, kebijakan publik adalah kehormatan untuk pemerintah, bukannya tugas. *Kesembilan*, kebijakan publik adalah untuk memuliakan rakyat, bukan untuk menghukum. Dan *kesepuluh*, kebijakan publik adalah pembelajaran yang baik bagi suatu bangsa untuk hidup lebih baik dari hari lalu dan hari ini.

Namun demikian, pemerintah belum sepenuhnya mampu untuk menghasilkan berbagai kebijakan yang berkualitas. Kementerian Dalam Negeri mengidentifikasi ada sebanyak 42.633 peraturan yang tumpang tindih. Pada tahun 2016, Kementerian dalam Negeri mengemukakan bahwa ada sebanyak 3.143 peraturan bermasalah yang dibatalkan. Peraturan yang dibatalkan tersebut adalah 1.765 peraturan di tingkat provinsi, 1.267 peraturan di tingkat kabupaten/kota dan 111 peraturan menteri dalam negeri. Peraturan tersebut dibatalkan dan dinilai tidak berkualitas karena tumpang tindih; bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi; bertentangan dengan kepentingan umum; menghambat pertumbuhan ekonomi, menghambat proses perizinan dan investasi; memperpanjang birokrasi; dan diskriminatif.

Selain persoalan lemahnya kualitas kebijakan yang dihasilkan pemerintah, terdapat pula masalah ketidaktersediaan instrumen yang jelas dan memadai untuk mengukur kualitas kebijakan. Kualitas kebijakan sering dinilai melalui penelitian, opini, pendapat ataupun keluhan masyarakat. Beberapa inisiatif pernah dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, namun masih bersifat parsial dan hasilnya belum menyeluruh. Instrumen yang digunakan masih bervariasi dan menghasilkan informasi yang dapat berbeda mengenai kualitas kebijakan.

Berkaitan dengan masalah tersebut, Lembaga Administrasi Negara melalui Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan (Pusaka) mengeluarkan instrumen untuk mengukur kualitas

kebijakan publik di Indonesia yang disebut dengan Indeks Kualitas Kebijakan (*Policy Quality Index*). Indeks kualitas kebijakan (IKK) memiliki manfaat untuk mengetahui kualitas kebijakan di Instansi pemerintah; menyusun profil kualitas kebijakan publik nasional; meningkatkan kualitas kebijakan; sebagai acuan program peningkatan kualitas kebijakan instansi pemerintah; sebagai instrumen penilaian sasaran RB yang berkaitan dengan perbaikan kualitas kebijakan; sebagai acuan pembinaan analisis kebijakan; dan peningkatan kualitas pembinaan analisis kebijakan.

Ada empat variabel yang digunakan dalam menyusun Indeks kualitas kebijakan (IKK), yaitu agenda setting; formulasi kebijakan; implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Variabel agenda setting dan formulasi kebijakan termasuk pada tahap perencanaan kebijakan. Sementara variabel implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan termasuk tahapan pelaksanaan kebijakan. Pada variabel agenda setting, ada tiga indikator yang digunakan. Indikator tersebut adalah proses identifikasi masalah; kajian terhadap isu aktual; dan konsultasi publik terhadap isu dan assessment yang dilakukan. Pada variabel formulasi kebijakan, indikator yang digunakan adalah *forward looking* (tujuan kebijakan dan orientasi jangka panjang); *outward looking* (kebijakan disusun memperhatikan multi perspektif dan dampak kebijakan); *learns lessons* (kebijakan disusun atas dasar evaluasi kebijakan terdahulu); *innovative* (inovasi); *evidence-based* (berbasis data dan informasi akurat); *compliance* (kesesuaian dengan hukum dan peraturan perundangan lain). Sementara itu, indikator yang digunakan pada variabel implementasi kebijakan adalah dimensi perencanaan, dimensi kelembagaan dan dimensi komunikasi kebijakan. Dan indikator yang digunakan pada variabel evaluasi kebijakan adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan (efektivitas, efisiensi, dampak dan keberlanjutan).

Indeks kualitas kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh pemimpin daerah, terutama pemimpin yang baru terpilih dalam merumuskan dan melaksanakan berbagai kebijakan di daerahnya. Harapannya, setiap daerah dapat menghasilkan berbagai kebijakan yang berkualitas, kebijakan yang dapat merespon dan menyelesaikan berbagai masalah publik di daerahnya. Dengan demikian, dapat cita-cita peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud (Shafiera Amalia).

Referensi

- Nugroho, Riant. (2017). Rembugnas 2017: Membangun Kebijakan Publik Unggul. Diunduh dari : <https://nasional.sindonews.com/read/1250068/18/rembugnas-2017-membangun-kebijakan-publik-unggul-1508462976/>.
- , 2018. Sudah 162 Permendagri “Bermasalah” yang Dibatalkan. Diunduh dari : <http://www.kemendagri.go.id/news/2018/02/08/sudah-162-permendagri-bermasalah-yang-dibatalkan>.
- , 2016. Instrumen Penilaian Kualitas Kebijakan pada Instansi Pemerintah. Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara.
- Daftar Daerah yang Melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2018. Diunduh dari : <http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/InfoOTDA/Daftar%20Daerah%20yang%20Melakukan%20Pilkada%20Serentak%20Tahun%202018.pdf>.